

LAPORAN TAHUNAN



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

TAHUN 2025



0741-444015



Dlhkota2017@gmail.com



Dlh.jambikota.go.id

**Jl. JenderalBasukiRahmad
No. 8 Kota Baru Kota Jambi**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhana Wataala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025.

Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang tetuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi



MAHRUZAR, ST.
NIP.197801272005011004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	I-7
1.3 Tantangan dan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	I-9
BAB II PAGU BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Pagu Belanja Perangkat Daerah berdasarkan Komponen Belanja Beserta Realisasi	II-1
2.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	II-3
2.3 Capaian Kinerja Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD serta Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	II-6
2.4 Akuntabilitas Kinerja.....	II-21
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.	III-1
BAB IV INOVASI, PRESTASI DAN PENGHARGAAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Aset Perangkat Daerah	I-5
1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023- 2025	I-7
1.3 Tantangan, Permasalahan dan Upaya Mengatasi Tantangan dan Permasalahan Tahun 2025	I-7
2.1 Penjabaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025	II-1
2.2 Keterkaitan Urusan Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029	II-6
2.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025	II-8
2.4 Capaian Program Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2025	II-12
2.5 Tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Jambi Tahun 2024	II-21
2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	II-24
2.7 Indikator Kinerja Kunci	II-24
2.8 Capaian SDGs	II-27
4.1 Daftar Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2023	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, laporan ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Strategis tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

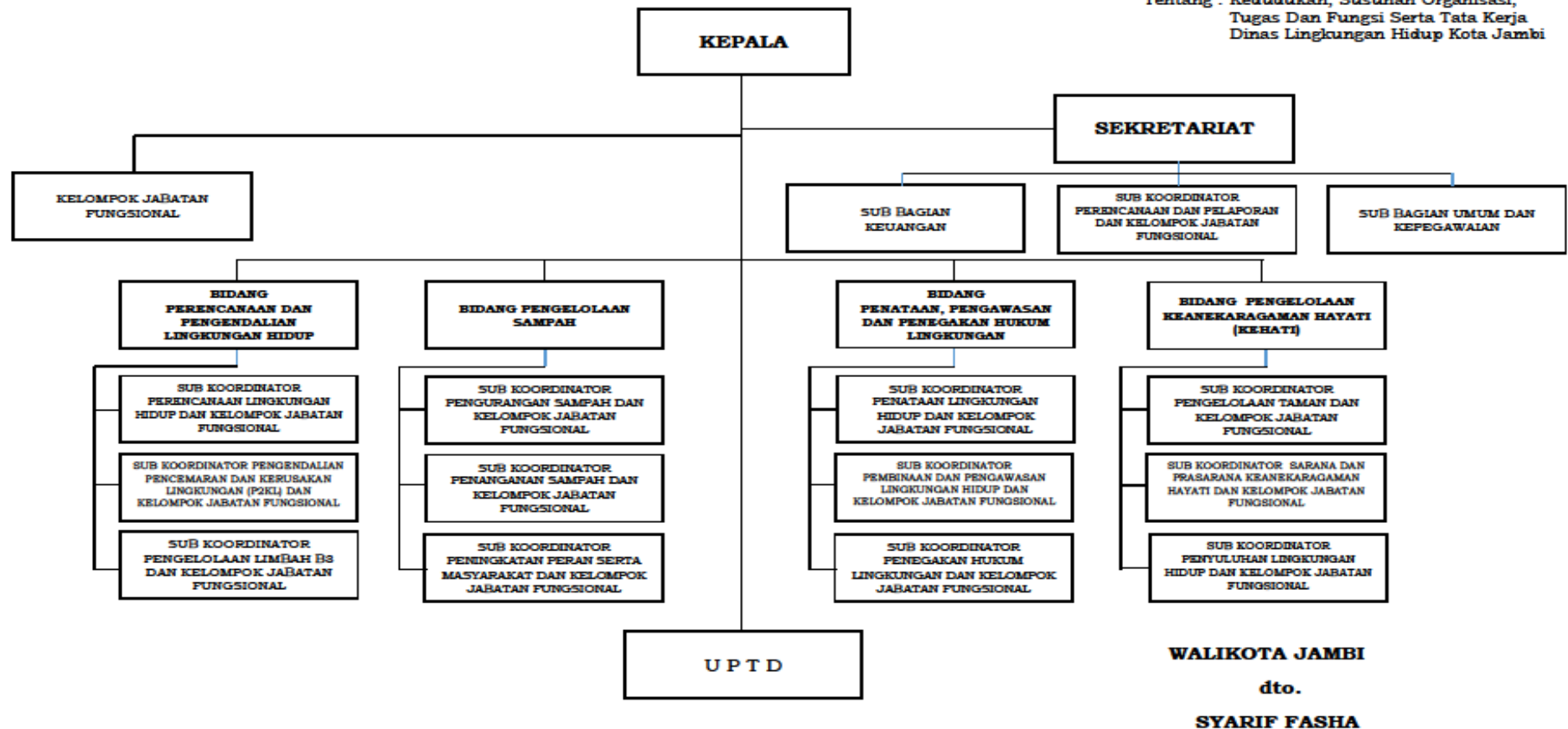
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
3. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
4. Pengelolaan sampah yang meliputi : pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengangkutan dan sarana prasarana persampahan.
5. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
6. Pengelolaan taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
8. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
9. Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
10. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
11. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
12. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Adiwiyata, DIKLHD, Proklim, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Duta Lingkungan.
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh MAHRUZAR, ST yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
Nomor : 53 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2025 terdapat 162 pegawai yang terdiri dari 60 orang PNS, 93 orang PPPK, 6 orang pegawai BLUD Laboratorium dan 3 orang Alih Daya (*Outsourcing*). Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 53,09% (86 orang) dan sisanya sebanyak 46,91% merupakan pegawai perempuan (76 orang). Pegawai golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang, golongan III sebanyak 38 orang, golongan II sebanyak 16 orang serta golongan I sebanyak 1 orang.

Pada tahun 2025 Indeks Profesionallitas ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi belum dinilai oleh Badan Kepegawaian Nasional.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Aset Perangkat Daerah

No	Uraian	Saldo Akhir s/d Tahun 2025	
		Jumlah Barang	Harga Barang
	TANAH	13	9.177.659.066,66
1	TANAH	13	9.177.659.066,66
	PERALATAN DAN MESIN	1.691	79.221.202.999,97
1	ALAT BESAR	66	15.893.459.632,00
2	ALAT ANGKUTAN	201	16.277.619.934,84
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	102	456.881.100,00
4	ALAT PERTANIAN	44	672.930.200,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	690	5.067.753.956,83
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	127	760.076.020,00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	2.497.500,00
8	ALAT LABORATORIUM	313	6.969.810.408,30
9	ALAT PERSENJATAAN	-	-
10	KOMPUTER	142	1.271.365.864,00
11	ALAT EKSPLORASI	-	-

12	ALAT PENGEBORAN	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	5.883.000,00
16	ALAT PERAGA	-	-
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4	31.842.925.384,00
18	RAMBU - RAMBU	-	-
19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	312	75.249.844.787,69
1	BANGUNAN GEDUNG	308	74.467.267.133,90
2	MONUMEN	-	-
3	BANGUNAN MENARA	-	-
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	782.577.653,79
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	74	218.419.239.958,73
1	JALAN DAN JEMBATAN	9	38.682.493.012,13
2	BANGUNAN AIR	33	168.445.768.904,61
3	INSTALASI	18	10.537.021.526,99
4	JARINGAN	14	753.956.515,00
	ASET TETAP LAINNYA	70	3.001.553.952,06
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-
3	HEWAN	18	31.750.002,06
4	BIOTA PERAIRAN	-	-
5	TANAMAN	52	2.969.803.950,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
	ASET LAINNYA	267	4.244.704.783
1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-
2	ASET TIDAK BERWUJUD	2	159.335.000,00
3	ASET LAIN-LAIN	265	4.085.369.782,50
	JUMLAH TOTAL	2.427	389.314.205.547,61

1.2 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

a. Target dan Realisasi Tahun 2023-2025

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2023-2025

No	Jenis PAD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.000.000.000	9.583.936.146	15.439.000.000	8.737.087.950	10.746.754.000	10.403.916.750
2	Retribusi masuk Hutan Kota	300.000.000.	383.835.000	300.000.000	479.102.000	300.000.000	458.921.000
3	Retribusi Pengujian Sampel	150.000.000	295.794.600	150.000.000	315.021.300	300.000.000	333.472.200
4	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	391.637.953	246.248500	391.637.953	236.381.900	391.637.953	290.276.800
5	Pendapatan BLUD			741.446.000	748.926.600	741.446.000	828.904.546

b. Tantangan dan Permasalahan serta Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Tantangan dan Permasalahan serta Tingkat Keberhasilan yang dicapai.

Tabel 1.3
Tantangan, Permasalahan dan Upaya Mengatasi Tantangan dan Permasalahan Tahun 2025

No	Jenis PAD	Tantangan	Permasalahan	Upaya mengatasi Tantangan dan Permasalahan
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Belum adanya peta jalan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan sampah hingga ke tingkat objek retribusi (sumber) - Minimnya pemahaman objek retribusi dalam menjalankan kewajiban membayar retribusi - Belum adanya mekanisme (SOP) baku dalam	- Tidak adanya perencanaan & peningkatan sarana prasarana + tolls pengelolaan sampah (TPS, Armada, Fasilitas pengolahan, edukasi, aplikasi) - Belum ada peta jalan data pemenuhan target retribusi persampahan - Base data objek retribusi yang tidak tervalidasi keaktifannya	- Membuat peta jalan target retribusi dalam Renstra DLH - Membuat SOP pemungutan retribusi (SOP manual & aplikasi) - Membuat aplikasi pembayaran retribusi - Validasi objek retribusi (pelaku usaha + masyarakat)

No	Jenis PAD	Tantangan	Permasalahan	Upaya mengatasi Tantangan dan Permasalahan
		pemungutan retribusi		
2	Retribusi masuk Hutan Kota	Penagihan Retribusi Masuk Hutan Kota	Masih ada sebagian masyarakat/pengunjung/ pengguna Hutan Kota yang tidak mau membayar ataupun minta keringanan dalam pembayaran retribusi masuk hutan kota	Memberikan penjelasan kepada masyarakat/ pengunjung/ pengguna Hutan Kota bahwa Retribusi ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah Kota Jambi dan nantinya akan digunakan kembali untuk biaya kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi
3	Retribusi Pengujian Sampel	- Persaingan pangsa pasar antara Laboratorium Swasta dengan Laboratorium Pemerintah - Meyakinkan customer terhadap kualitas pelayanan - Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian terhadap uji Laboratorium kualitas Lingkungan	- Masih kurangnya peralatan dan bahan kimia untuk pengujian (menambah ruang lingkup pengujian - Kurangnya pengetahuan customer terhadap pentingnya pengujian sampel - Bahan kimia yang terhambat dikarenakan kendala pengiriman	- Meningkatkan SDM Laboratorium dengan pelatihan-pelatihan - Sosialisasi kepada customer/pihak Perusahaan tentang pengujian sampel dan keuntungan melakukan pengujian - Menambah peralatan dan bahan kimia agar terpenuhinya permintaan customer - Memaksimalkan waktu pelayanan di Laboratorium
4	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	- Belum adanya reward yang ditetapkan dalam ketaatan pengelolaan sampah dan atas pembayaran retribusi sampah	- Base data objek retribusi yang tidak tervalidasi keaktifannya	- Validasi objek retribusi (pelaku usaha + masyarakat)
5	Pendapatan BLUD UPTD PS TPA Talang Gulo	- Belum adanya Insentif/remunerasi atas pendapatan BLUD - Belum terpilahnya sampah yang masuk ke TPA - Belum adanya produk daur ulang yang dapat di jual - Belum adanya investor pengolahan sampah	- Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di TPS lebih dari satu meter kubik. - Sampah yang belum terpilah menyulitkan untuk pemilahan di TPA. - Masih banyak masyarakat yang belum teredukasi pentingnya memilah sampah	- Meningkatkan edukasi pemilahan sampah - Meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah di TPS lebih dari satu meter kubik. - Pengadaan mesin daur ulang sampah untuk meningkatkan pendapatan dari penjualan produk daur ulang sampah - Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk daur ulang sampah

1.3 Tantangan dan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah.

Tantangan dan permasalahan penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi antara lain yaitu :

1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.
2. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan.
3. Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
7. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
8. Masih terbatasnya anggaran dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
9. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

BAB II

PAGU BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Pagu Belanja Perangkat Daerah berdasarkan Komponen Belanja Beserta Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendapat dana sebesar Rp. 60.756.831.633,-. Adapun realisasi anggaran belanja daerah terealisasi sebesar Rp.56.073.736.742,- sehingga anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 4.683.094.813,- atau dana yang terserap sebesar Rp. 92.29%.

Tabel 2.1
Penjabaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Realisasi	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(Rp)	%
5	Belanja Daerah					
5.1	Belanja Operasi	55.766.839.633	58.204.270.588	2.437.430.955	53.601.109.645	92,09
5.1.01	Belanja Pegawai	10.149.934.384	10.577.477.509	427.543.125	9.816.359.290	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.616.905.249	47.626.793.079	2.009.887.830	43.784.750.355	
5.2	Belanja Modal	2.232.276.367	2.552.560.967	220.284.600	2.472.627.097	96,87
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.068.335.067	1.288.619.667	220.284.600	1.214.544.101	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.163.941.300	1.263.941.300	100.000.000	1.258.082.996	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-		
	Jumlah Belanja	57.999.116.000	60.756.831.555	2.657.715.555	56.073.736.742	92,29
	Surplus/(Defisit)		(48.276.993.602)		(43.758.245.446)	90,64

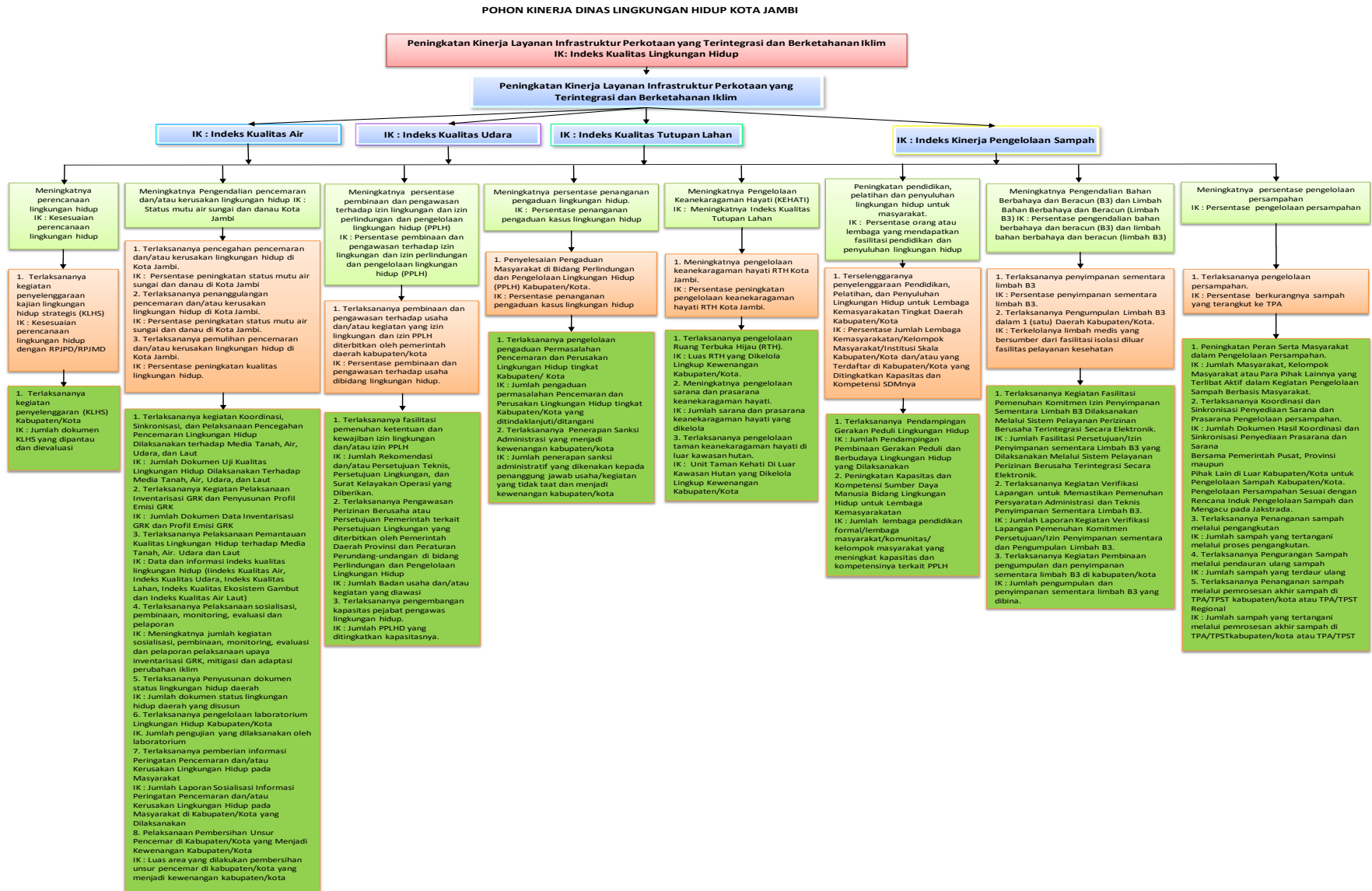
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 12.479.837.953,- (Dua belas miliar empat ratus

tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 12.315.491.296,48 (Dua belas miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam koma empat puluh delapan rupiah) atau dapat direalisasikan 98,68% dari target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya target PAD tersebut dikarenakan :

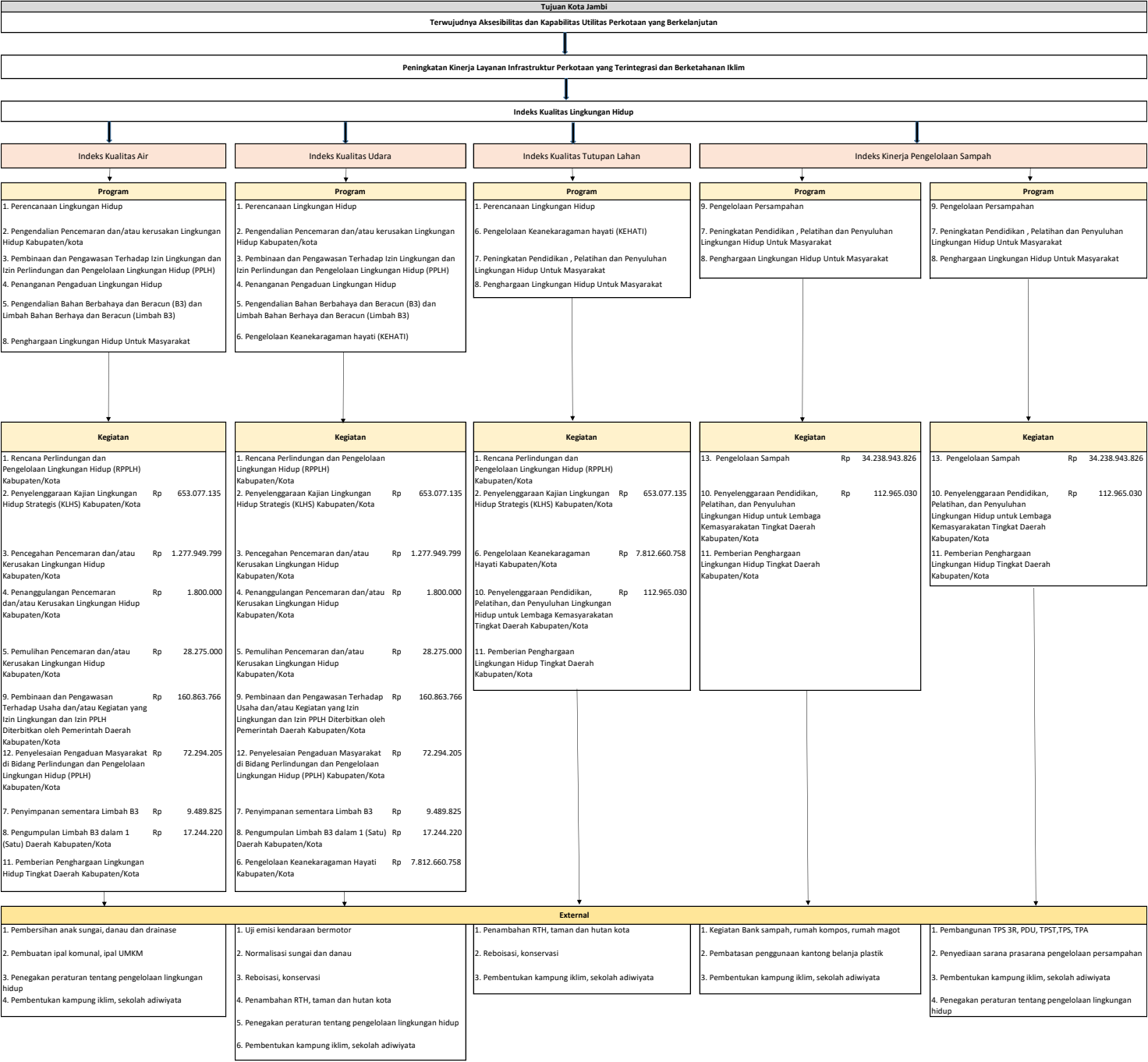
1. Banyaknya wajib retribusi persampahan yang sudah tutup usaha.
2. Wajib retribusi yang masih menunggak membayar dikarenakan adanya penurunan pemasukan yang diterima pelaku usaha.
3. Ketidaktahuan terhadap adanya retribusi yang harus dibayarkan setiap tahun sehingga wajib retribusi tidak meregistrasi perizinan atau Izin Usaha berupa SITU, karena wajib retribusi menganggap bahwa SITU sudah dihapuskan.

Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim										Sasaran Pembangunan RPJMD
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup										
2025 T : 65,16, 2026 T 65,18, 2027 T 65,19, 2028 T 65,20, 2029 T 65,21, 2030 T 65,22										
Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berketahanan iklim										
Indeks Kualitas Air		Indeks Kualitas Udara		Indeks Kualitas Lahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah				Indikator Sasaran OPD
2025 T 46,72, 2026 T 46,75, 2027 T 46,78, 2028 T 46,80, 2029 T 46,82, 2030 T 46,84		2025 T 90, 2026 T 90, 2027 T 90, 2028 T 90, 2029 T 90, 2030 T 90		2025 T 50,89, 2026 T 50,90, 2027 T 50,91, 2028 T 50,92, 2029 T 50,93, 2030 T 50,94		2025 T 56,5, 2026 T 58,10, 2027 T 59, 2028 T 60, 2029 T 61, 2030 T 62				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berhaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Pengelolaan Persampahan	Program
Indeks Reformasi Birokrasi	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten Kota	Status Mutu Air dan Danaau Kota Jambi	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Orang Atau Lembaga Yang Mendapatkan Fasilitas pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase Pengelolaan persampahan	
T : BB	T : 100%	T : 7 Nilai	T : 100%	T : 100%	T : 100%	T : 0,08%	T : 100%	T : 100%	T : 97,75	
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH) Kabupaten/ Kota	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Sampah	Kegiatan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Statgis (KLHS) Kabupaten/ Kota	2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.		3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota								
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.										
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.										
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.										
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.										
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.										
9. Peningkatan Pelayanan BLUD										
Sekretariat	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup		UPTD Laboratorium	Bidang Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan		UPTD Hutan Kota	Bidang Kehati	Bidang Pengelolaan Sampah	UPTD Pengelolaan Sampah	Penanggung Jawab
2025 Rp. 13.876.238.449	2025 Rp. 1.488.615.486		2025 Rp. 744.422.699	2025 Rp. 391.285.871		2025 Rp. 1.410.093.032	2025 Rp. 6.022.536.380	2025 Rp. 26.013.970.421	2025 Rp. 8.051.953.662	Anggaran
2026 Rp. 18.341.691.393	2026 Rp. 1.028.840.286		2026 Rp. 1.233.746.122	2026 Rp. 748.949.999		2026 Rp. 1.609.295.400	2026 Rp. 8.945.551.020	2026 Rp. 47.121.393.323	2026 Rp. 8.741.446.000	
2027 Rp. 20.175.860.532	2027 Rp. 1.107.725.273		2027 Rp. 1.346.120.734	2027 Rp. 823.844.999		2027 Rp. 1.931.154.480	2027 Rp. 9.840.106.122	2027 Rp. 51.735.174.251	2027 Rp. 9.615.590.000	
2028 Rp. 22.193.446.585	2028 Rp. 948.159.713		2028 Rp. 1.480.732.807	2028 Rp. 906.229.499		2028 Rp. 2.317.385.376	2028 Rp. 10.824.116.734	2028 Rp. 56.908.691.676	2028 Rp. 10.577.149.660	
2029 Rp. 24.412.791.24	2029 Rp. 942.206.630		2029 Rp. 1.628.806.0	2029 Rp. 996.852.449		2029 Rp. 2.780.862.451	2029 Rp. 11.906.528.408	2029 Rp. 62.645.002.426	2029 Rp. 11.634.864.624	
1030 Rp. 26.854.070.36	2030 Rp. 1.034.427.292		2030 Rp. 1.791.686.6	2030 Rp. 1.096.537.694		2030 Rp. 3.058.948.696	2030 Rp. 13.179.813.392	2030 Rp. 68.909.502.669	2030 Rp. 12.798.351.085	



Cross Cutting Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

CROSS CUTTING DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI
Tahun 2025



2.3 Capaian Kinerja Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD serta Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

a. Keterkaitan Urusan Perangkat Daerah terhadap RPJMD

Urusan Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029 urusan ini mengacu pada tujuan, yaitu. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan keterkaitan DLH Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Keterkaitan Urusan Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025
Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,16	62,79

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup memiliki satu Indikator Sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2025 IKLH mengalami penurunan dari kondisi awal tahun 2025 sebesar 65.15 menjadi 62.79, bila dibandingkan dari target tahun 2025 sebesar 65,16 dapat direalisasikan sebesar 62,79 persentase capaian kinerjanya mencapai 93,37%. Meningkat atau menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), serta Indeks Kualitas Lahan (IKL), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$IKLH = ((0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL))$$

$$IKLH = ((0,376 \times 55,48) + (0,405 \times 76,01) + (0,219 \times 50,89))$$

$$IKLH = 62.79$$

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di pengaruhi oleh :

A. Indeks Kualitas Air (IKA).

Nilai IKA Kota Jambi ditargetkan untuk tahun 2025 sebesar 46,72 dapat direalisasikan dengan nilai 55,48 termasuk kategori IKA Sedang, bila dibandingkan dengan target pada tahun 2025 maka terjadi peningkatan nilai sebesar 8,76 secara persentase mengalami peningkatan dari target sebesar 18,75%. Nilai ini diperoleh dari hasil perhitungan akumulasi Indeks Pencemar Air Sungai dan Air Danau.

Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) anak Sungai dan Danau di Kota Jambi pada Tahun 2025 disebabkan karena :

1. Secara bertahap telah terkendalnya sumber pencemar air limbah terutama adanya kebijakan Pembangunan IPAL Komunal di setiap perumahan yang di bangun.
2. Telah optimalnya program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Adanya program revitalisasi Sungai yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.
4. Pengendalian sumber pencemar di Kota Jambi, hal ini dibuktikan dengan mulai taatnya pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Mulai beroperasinya SPALD-T Kota Jambi dapat mengurangi pencemaran di Sungai Tembuku.

B. Indeks Kualitas Udara (IKU).

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang ditargetkan untuk tahun 2025 sebesar 90 terealisasi dengan nilai 76,01 dengan kategori IKU Baik, bila dibandingkan dengan target tahun 2025 mengalami penurunan nilai sebesar 13,99, secara persentase mengalami penurunan dari target sebesar 15,54%. Perhitungan IKU didapat dengan melakukan pengukuran kualitas udara ambien, untuk tahun 2025 adanya penambahan parameter yang semula 2 parameter menjadi 3 parameter yaitu NO₂, SO₂ dan PM_{2.5} dengan metode *passive sampler*, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup dan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Nomor B.1079/F.2/PKL.3.2/II/2025 tanggal 13 November 2025 Perihal Penyampaian

Data Konsentrasi PM_{2.5} Citra Satelit untuk Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2025, hasilnya melebihi baku mutu sebesar 16,40 baku mutu yang ditetapkan sebesar 15, sehingga jumlah parameter yang diukur menjadi tiga parameter, sedangkan pada tahun 2024 hanya 2 parameter yaitu NO₂ dan SO₂, dengan penambahan parameter tersebut sangat signifikan mempengaruhi hasil perhitungan indeks kualitas udara.

C. Indeks Kualitas Lahan.

Nilai Indeks Kualitas Lahan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 50,89 dapat direalisasikan sebesar 50,89 dengan kategori Kurang, bila dibandingkan dengan target tahun 2025 secara persentase dapat direalisasikan dari target sebesar 100%, nilai IKL didapat dengan menggunakan rumus :

$$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$$

$$\begin{aligned} IKTL &= 100 - ((84,3 - (\text{Tutupan Hutan} \times 100)) \times (50/54,3)) \\ &= 100 - ((84,3 - (0,3096 \times 100)) \times (50/54,3)) \\ &= 100 - ((84,3 - 30,96) \times 0,92) \\ &= 100 - (53,3 \times 0,9208) \\ &= 100 - (49,1063) \\ &= 50,89 \end{aligned}$$

$$IKL = 50,89 + 0$$

$$= 50,89$$

Untuk Kota Jambi belum melakukan perhitungan Faktor Koreksi Gambut.

b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Realisasi sasaran strategis perangkat daerah, tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,16	62,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2025

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada Tahun 2025 dengan keterangan sebagai berikut :

Pada tahun 2025 IKLH mengalami penurunan dari kondisi awal tahun 2025 sebesar 65.15 menjadi 62.79, bila dibandingkan dari target tahun 2025 sebesar 65,16 dapat direalisasikan sebesar 62,79 persentase capaian kinerjanya mencapai 93,37%. Meningkat atau menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), serta Indeks Kualitas Lahan (IKL), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$IKLH = ((0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL))$$

$$IKLH = ((0,376 \times 55,48) + (0,405 \times 76,01) + (0,219 \times 50,89))$$

$$IKLH = 62.79$$

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di pengaruhi oleh :

1. Indeks Kualitas Air (IKA).

Nilai IKA Kota Jambi ditargetkan untuk tahun 2025 sebesar 46,72 dapat direalisasikan dengan nilai 55,48 termasuk kategori IKA Sedang, bila dibandingkan dengan target pada tahun 2025 maka terjadi peningkatan nilai sebesar 8,76 secara persentase mengalami peningkatan dari target sebesar 18,75%. Nilai ini diperoleh dari hasil perhitungan akumulasi Indeks Pencemar Air Sungai dan Air Danau.

Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) anak Sungai dan Danau di Kota Jambi pada Tahun 2025 disebabkan karena :

- a Secara bertahap telah terkendalinya sumber pencemar air limbah terutama adanya kebijakan Pembangunan IPAL Komunal di setiap perumahan yang di bangun.
- b Telah optimalnya program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- c Adanya program revitalisasi Sungai yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.

- d Pengendalian sumber pencemar di Kota Jambi, hal ini dibuktikan dengan mulai taatnya pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- e Mulai beroperasinya SPALD-T Kota Jambi dapat mengurangi pencemaran di Sungai Tembuku.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU).

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang ditargetkan untuk tahun 2025 sebesar 90 terealisasi dengan nilai 76,01 dengan kategori IKU Baik, bila dibandingkan dengan target tahun 2025 mengalami penurunan nilai sebesar 13,99, secara persentase mengalami penurunan dari target sebesar 15,54%. Perhitungan IKU didapat dengan melakukan pengukuran kualitas udara ambien, untuk tahun 2025 adanya penambahan parameter yang semula 2 parameter menjadi 3 parameter yaitu NO₂, SO₂ dan PM_{2.5} dengan metode *passive sampler*, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, dan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Nomor B.1079/F.2/PKL.3.2/II/2025 tanggal 13 November 2025 Perihal Penyampaian Data Konsentrasi PM_{2.5} Citra Satelit untuk Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2025, hasilnya melebihi baku mutu sebesar 16,40 baku mutu yang ditetapkan sebesar 15, sehingga jumlah parameter yang diukur menjadi tiga parameter, sedangkan pada tahun 2024 hanya 2 parameter yaitu NO₂ dan SO₂, dengan penambahan parameter tersebut sangat signifikan mempengaruhi hasil perhitungan indeks kualitas udara, mengakibatkan perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara Kota Jambi mengalami penurunan.

3. Indeks Kualitas Lahan.

Nilai Indeks Kualitas Lahan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 50,89 dapat direalisasikan sebesar 50,89 dengan kategori Kurang, bila dibandingkan dengan target tahun 2025 secara persentase dapat direalisasikan dari target sebesar 100%, nilai IKL didapat dengan menggunakan rumus :

IKL = IKTL + Faktor Koreksi Gambut

$$\begin{aligned} \text{IKTL} &= 100 - ((84,3 - (\text{Tutupan Hutan} \times 100)) \times (50/54,3)) \\ &= 100 - ((84,3 - (0,3096 \times 100)) \times (50/54,3)) \\ &= 100 - ((84,3 - 30,96) \times 0,92) \\ &= 100 - (53,3 \times 0,9208) \\ &= 100 - (49,1063) \\ &= 50,89 \end{aligned}$$

$$\text{IKL} = 50,89 + 0$$

$$= 50,89$$

Untuk Kota Jambi belum melakukan perhitungan Faktor Koreksi Gambut.

c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilengkapi dengan Indikator, Target dan Realisaasi Anggaran Tahun 2023

Tabel 2.4
Capaian Program Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN	Perangkat Daerah	Kebijakan	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi			
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi					60.756.831.555		56.073.736.742	92,29	
				Belanja Operasi			58.204.270.588		53.601.109.645	92,09	
				Belanja Modal			2.552.560.967		2.472.627.097	96,87	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	BB	14.883.069.391	BB	13.682.165.203	91,93	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	70	42.610.118	77,1	34.588.751	81,17	110%
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	18.702.330	2	18.186.000	97,24	100%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2	12.912.000	2	8.440.000	65,37	100%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	2	4.085.910	2	3.493.800	85,51	100%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	2.807.375	3	1.319.851	47,01	100%
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	4.102.503	16	3.149.100	76,76	100%

				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan	100%	11.114.325.409	100%	10.343.506.629	93,06	100%
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	92	10.577.477.509	153	9.816.359.290	92,80	100%
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48	524.460.000	48	519.128.600	98,98	100%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	10.063.850	12	5.753.500	57,17	100%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.324.050	1	2.265.239	97,47	100%
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	40.800.000	100%	31.500.000	77%	100%
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	40.800.000	12	31.500.000	77,21	100%
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah	61	314.650.000	77,5	298.388.620	94,83	100%
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	195.360.000	1	186.036.000	95,23	100%
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	119.290.000	25	112.352.620	94,18	100%
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	207.876.563	100%	167.029.537	80,35	100%
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	13.274.275	4	12.321.534	92,82	100%

				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	21.889.788	2	15.183.700	69,36	100%
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	13.500.000	1	3.900.000	28,89	100%
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	159.212.500	2	135.624.303	85,18	100%
				Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	535.156.723	100%	491.233.991	91,79	100%
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	120.872.340	90	102.704.011	84,97	100%
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32	414.284.383	32	388.529.980	93,78	100%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	1.688.871.578	100%	1.463.681.460	86,67	100%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	-	0%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	446.100.000	12	353.974.463	79,35	100%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	79.199.612	7	75.167.060	94,91	100%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1.163.571.966	5	1.034.539.937	88,91	100%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	938.779.000	100%	852.236.215	90,78	100%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	278.390.000	64	211.203.250	75,87	100%
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	53.259.000	50	35.632.965	66,91	100%

				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	607.130.000	1 unit	605.400.000	99,72	100%
2				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	653.077.135	100%	636.761.355	97,50	100%
				Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Tersusunnya RPPLH Kota Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	342.668.165	100%	331.709.485	96,80	100%
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	342.668.165	1 Dokumen	331.709.485	96,80	100%
3				Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Keselaran Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan	100%	310.408.970	100%	305.051.870	98,27	100%
				Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi	1	310.408.970	1	305.051.870	98,27	100%
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7	1.308.024.799	7	1.233.464.554	94,30	100%
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	1.277.949.799	100%	1.203.390.754	94,17	100%
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	56.601.880	2	55.994.100	98,93	100%
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	43.187.314	1	41.248.710	95,51	100%
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	15 Lokasi	420.134.625	15 Lokasi	386.202.625	91,92	100%

				Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2 Laporan	51.005.570	2 Laporan	47.658.903	93,44	100%
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	77.495.690	1	71.815.000	92,67	100%
				Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	629.524.720	12	600.471.416	95,38	100%
				Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	1.800.000	100%	1.798.800	99,93	100%
				Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	1.800.000	1	1.798.800	99,93	100%
4				Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	0,27%	28.275.000	-0,03%	28.275.000	100	100%
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	150	28.275.000	150	28.275.000	100	100%
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	49,99	7.812.660.758	50,89	7.476.461.686	95,70	100%
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	0,08%	7.812.660.758	1,84%	7.476.461.686	95,70	100%
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971,18	6.098.458.510	971,18	5.781.572.774	94,80	100%
5				Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	53	357.617.801	53	346.738.905	96,96	100%

				Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota	3	1.356.584.447	3	1.348.150.007	99,38	100%
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100%	26.734.045	100%	25.328.065	94,74	100%
				Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	9.489.825	100%	8.884.065	93,62	100%
				Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17	6.781.950	5	6.659.490	98,19	100%
				Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20	2.707.875	6	2.224.575	82,15	100%
6				Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	100%	17.244.220	100	16.444.000	95,36	100%
				Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	100	17.244.220	5	16.444.000	95,36	100%
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	160.863.766	100%	130.489.763	81,12	100%
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	30%	160.863.766	30%	130.489.763	81,12	100%

				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150	40.651.651	110	39.284.500	96,64	100%
7				Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	160	78.212.115	166	65.991.500	84,38	100%
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/pelatihan	4	42.000.000	4	25.213.763	60,03	100%
				Program Peningkatan Pendidikan, dan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	112.965.030	100	88.683.046	78,50	100%
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	100%	112.965.030	100	88.683.046	78,50	100%
8				Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	51.986.250	2	49.756.246	95,71	100%
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	9	60.978.780	12	38.926.800	63,84	100%
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	72.294.205	100%	57.547.930	79,60	100%

				Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	72.294.205	100%	57.547.930	79,60	100%
9				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	35	13.606.445	28	12.107.900	88,99	100%
				Sub Kegiatan Penerapan Sanksi administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	18	58.687.760	32	45.440.030	77,43	100%
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	97,25%	34.238.943.826	94,88%	32.064.880.101	93,65	100%
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	23,00%	34.238.943.826	12,53%	32.064.880.101	93,65	100%
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	37.507.550	7	29.223.855	77,91	100%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	3.448.800	1	3.408.000	98,82	100%
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	116.613,84	25.859.020.610	133.995,63	25.590.522.645	98,96	100%
				Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui Pendaauran Ulang Sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	11417	1.153.401.310	19.241,68	1.114.397.108	96,62	100%

				Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	130.000	7.185.565.556	120.538,18	5.327.328.493	74,14	100%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1.488.198.600		677.955.039	45,56	100%
				Peningkatan Pelayanan BLUD			1.488.198.600		677.955.039	45,56	100%
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1.488.198.600	1	677.955.039	45,56	100%

d. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Adapun kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan Melalui Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM)	1. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Bahagia	Peningkatan jasa pengelolaan sampah kepada masyarakat.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024

Tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Jambi Tahun 2024 kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Jambi Tahun 2024

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Pansus III		
1	Segera mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Jambi, terutama masalah TPS di lingkungan masyarakat	Melakukan sosialisasi kepada Camat, Lurah, Ketua Forum RT, dan Lam Sekota Jambi dalam rangka pencaangan Program OPBM (Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat) Serta mengingatkan kembali	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam mengatasi permasalahan

		peran dan tanggungjawab RT, Lurah dan Camat sesuai Perda No 5 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Sampah	sampah di lingkungan masing-masing serta memelopori pelaksanaan OPBM di wilayah masing-masing
2	Menegakan perda terkait pelanggaran pembuangan sampah guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan	Telah melakukan patroli yustisi persampahan pada tahun 2025 telah tertangkap tangan sebanyak 7 orang	Penanganan sampah.
3	Melibatkan RT, Lurah serta Camat untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayah masing-masing	Melakukan sosialisasi kepada Camat, Lurah, Ketua Forum RT, dan Lam Sekota Jambi dalam rangka pencaangan Program OPBM (Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat) Serta mengingatkan kembali peran dan tanggungjawab RT, Lurah dan Camat sesuai Perda No 5 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Sampah	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di lingkungan masing-masing serta memelopori pelaksanaan OPBM di wilayah masing-masing
4	Meremajakan gerobak motor (germo) yang ada di setiap kelurahan dan kecamatan	Pengadaan Gerobak Motor melalui Program BKBK sebanyak 68 unit, dan 7 Gerobak Motor dari Pokir DPRD Kota Jambi	Meningkatkan Sarana Prasarana Pengumpulan Sampah dari sumber.

5	Mengejar target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan agar target PAD tercapai	Melakukan Penagihan langsung terhadap pelaku usaha yang berpotensi membayar retribusi sebanyak 100 Pelaku usaha	Memenuhi target retribusi kebersihan
6	Armada truk sampah yang digunakan oleh pihak ketiga supaya memperhatikan kelayakan kendaraan	Tahun 2026 DLH telah menganggarkan Sewa Kendaraan Dumptruck sebanyak 20 unit	Meremajakan Armada Pengangkutan Sampah
7	Pengangkutan sampah harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Meningkatkan disiplin sopir sesuai jadwal	Terangcutnya sampah
8	Pengawasan Pekerja Harian Lepas (PHL) dilapangan harus ditingkatkan	Evaluasi terhadap petugas pengawas	Pengawasan berjalan sebagaimana mestinya
9	Lebih cermat dalam penyusunan anggaran agar tidak terlalu jauh deviasi antara target dan realisasi	Menyusun anggaran dengan terperinci	Anggaran tepat sasaran

2.4 Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025 - 2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2025 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, dari satu sasaran strategis dengan sebanyak 1 indikator kinerja yang ditetapkan maka perjanjian kinerja kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,16

b. Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 2,7
Indikator Kinerja Kunci

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data
			2023	2024	2025	
1	Urusan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,09	65,15	62,79	DLH
2	Urusan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Jambi	96,41%	95,13%	94,88%	DLH
3	Urusan Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	88%	95%	96%	DLH
4	Urusan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	35,19	46,71	55,48	DLH
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,52	90,00	76,01	DLH
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	49,93	50,87	50,89	DLH
5	Urusan Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase penanganan sampah 73.95%, dimana jumlah penanganan	Persentase penanganan sampah 82.54%, dimana jumlah penanganan	Persentase penanganan sampah 72.12%, dimana jumlah penanganan	DLH

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data
			2023	2024	2025	
			sampah 119.723,96 terhadap timbulan sampah 161.897,58	sampah 133.995,63 terhadap timbulan sampah 162.341,13	n sampah 133.995,63 terhadap timbulan sampah 120.538,18	
6	Urusan Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	DLH
7	Urusan Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota	8,50%	3,6%	3,6%	DLH
8	Urusan Lingkungan Hidup	Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kab/Kota	0%	0%	0%	DLH
9	Urusan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0%	0%	0%	DLH
10	Urusan Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kab/Kota yang ditangani	100%	100%	100%	DLH
11	Urusan Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0%	0%	133%	DLH

c. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2025

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal hanya untuk Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat dan Urusan Sosial, Dinas Lingkungan Hidup tidak termasuk dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.

d. Capaian SDGs

Pencapaian Program SDGs untuk Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Capaian SDGs

Target dan Indikator			SUMBER DATA	OPD Penanggun Jawab	2023		2024		2025		DOKUMEN PENDUKUNG
					target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	
6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK											
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	Jumlah limbah cair industri yang dikelola secara aman dibagi dengan jumlah limbah cair industri keseluruhan yang dilaporkan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Data Industri yang melakukan swapantau melalui Aplikasi SIMPEL dan melaporkannya secara berkala, Disperindag, DLHK, dan KLHK (Aplikasi SIMPEL)	DLH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaporan Dokumen
7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU											
7.2 Jumlah konsumsi energi dari kota yang dicapai, dalam liter atau kWh											
7.2.1	Ada upaya efisiensi energi dari operasional kota	Upaya efisiensi energi dari operasional kota adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi dari kegiatan harian kota. Kegiatan upaya efisiensi yang dilakukan dapat berupa training penghematan penggunaan energi listrik / bahan bakar dan sosialisasi mengenai penghematan penggunaan energi listrik / bahan bakar.	1. Bagian Keuangan PEMDA 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	DLH							
7.2.2	Ada sistem monitoring dan evaluasi untuk melacak keberhasilan upaya efisiensi energi	Sistem monitoring dan evaluasi menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan melakukan penilaian terkait	Bagian Keuangan PEMDA	DLH							

		keberhasilan pengurangan penggunaan energi. Informasi terkait pelaporan internal atau notulensi rapat evaluasi efisiensi energi menjadi contoh dari kegiatan efisiensi energi.									
7.2.3	Capaian keberhasilan efisiensi energi	Persentase dari selisih pemakaian energi tahun 2020 ke 2019 terhadap pemakaian tahun 2020 di perkantoran PEMDA.	Bagian Keuangan PEMDA, berupa catatan kWh pembelian listrik untuk operasional kantor dan pembelian bahan bakar untuk kendaraan operasional.	DLH							
7.3 Konsumsi energi - terbarukan											
7.3.1	% Bauran energi terbarukan dalam operasional kota	Persentase penggunaan energi terbarukan terhadap total konsumsi energi dalam operasional gedung perkantoran Pemda. Energi terbarukan yang termasuk dalam operasional gedung perkantoran Pemda adalah energi listrik dari sumber terbarukan.	1. Bagian Keuangan PEMDA 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	DLH/ Bag PEREKO NOMIAN							
	1. bauran energi terbarukan <10%										
	2. bauran energi terbarukan 10-50%										
	3. bauran energi terbarukan > 50%										
7.3.2	% Bauran energi bersih-terbarukan dalam operasional transportasi kota	Persentase penggunaan energi bersih-terbarukan terhadap total konsumsi energi dalam operasional transportasi Pemda. Yang dimaksud dengan energi terbarukan dalam operasional transportasi adalah penggunaan mobil listrik tenaga non-fossil (tenaga surya) untuk aktivitas Pemda.	1. Bagian Keuangan PEMDA, bagian umum - pengeluaran rutin per bulan 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	DLH/ Bag PEREKO NOMIAN							
	1. bauran energi terbarukan <10%										
	2. bauran energi terbarukan 10-50%										

	3. bauran energi terbarukan > 50%										
11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN											
11.4. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota											
11.4.1	Indeks Kualitas Udara										
11.4.1.1	Jumlah partikel kualitas udara SO ₂ (ppm)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL) 2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada https://ispu.menlhk.go.id/map.html	DLH		0,00017		0,2371		0,13	Laporan Indeks Kualitas Udara Di Kota Jambi
	> 0,14 ppm										
	< 0,14 ppm										
11.4.1.2.	Jumlah partikel kualitas udara NO ₂ (ppm)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL) 2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada https://ispu.menlhk.go.id/map.html	DLH		0,00043		0,1518		0,22	Laporan Indeks Kualitas Udara Di Kota Jambi
	> 0,08 ppm										
	< 0,08 ppm										
11.4.1.3	Jumlah partikel kualitas udara O ₃ (µg/m ³)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL) 2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada https://ispu.menlhk.go.id/map.html	DLH		13,29		22,63		7,43	
	> 50 µg/m ³										
	< 50 µg/m ³										
11.4.2.	Persentase sampah										

	kota yang terkelola										
11.4.2.1	Jumlah sampah kota yang terkelola	Persentase jumlah timbunan sampah kota yang terkelola terhadap jumlah timbunan sampah kota yang diproduksi secara keseluruhan pada tahun pelaporan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	DLH	90,89 %	88,87%	97,75 %	95,13%	97,25%	72,12%	
11.4.2.2	Jumlah inisiatif bank sampah per kelurahan	Jumlah bank sampah yang dikelola baik oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan di suatu kota pada tahun pelaporan.	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	DLH		15		15		15	
11.4.3	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Rerata tahunan PM 10 di perkotaan per jumlah penduduk	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) - KLHK	DLH		22,59		17,61		14,97	
11.5 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.											
11.5.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Total luasan RTH, RTNH, serta jalan dibandingkan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan dinyatakan dalam bentuk persentase.	LAPAN (citra satelit), Kementerian PUPR								
12. KOSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB											
12.2. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											
	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	Jumlah timbunan limbah B3 yang dikelola dari sektor industri manufaktur, agroindustri, pertambangan, energi dan migas, prasarana jasa dibagi dengan total timbunan limbah B3 yang dihasilkan dalam kota pada tahun pelaporan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan, DISPERINDAG, DLHK, Kota Dalam Angka.	DLH							
13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM											
3.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan											

nasional											
13.2.1	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) dalam satu tahun per jumlah penduduk.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGNSMART Online).	DLH	-	-		2.705,70			
13.2.2	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
13.2.2.1	Energi	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang energi. *Atau penilaian berdasarkan ada/tidak dokumen Rencana Aksi Iklim	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2. UPT Terkait 3. KLHK	DLH	10	6	10	8	7		Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Pemerintah Kota Jambi. Program Kampung Iklim
	1. tidak terdapat kebijakan										
	2. terdapat kebijakan namun belum dilaksanakan										
	3. terdapat kebijakan < 50% kebijakan telah terlaksana										
	4. terdapat kebijakan dan < 50% kebijakan telah terlaksana										
13.2.2.2	Limbah	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang pengelolaan limbah. *Atau penilaian berdasarkan ada/tidak dokumen Rencana Aksi Iklim	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2. UPT Terkait 3. KLHK	DLH							
	1. tidak terdapat kebijakan										
	2. terdapat kebijakan namun belum dilaksanakan										
	3. terdapat kebijakan < 50% kebijakan telah terlaksana										
	4. terdapat kebijakan dan < 50% kebijakan telah terlaksana										
13.2.2.3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (Industrial Processes)	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	DLH							

	and Product Use, IPPU)	IPPU. *Atau penilaian berdasarkan ada/tidak dokumen Rencana Aksi Iklim	2. UPT Terkait 3. KLHK								
	1. tidak terdapat kebijakan										
	2. terdapat kebijakan namun belum dilaksanakan										
	3. terdapat kebijakan < 50% kebijakan telah terlaksana										
	4. terdapat kebijakan dan < 50% kebijakan telah terlaksana										
13.2.2.4	Pertanian	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang pertanian. *Atau penilaian berdasarkan ada/tidak dokumen Rencana Aksi Iklim	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2. UPT Terkait 3. KLHK	DLH							
	1. tidak terdapat kebijakan										
	2. terdapat kebijakan namun belum dilaksanakan										
	3. terdapat kebijakan < 50% kebijakan telah terlaksana										
	4. terdapat kebijakan dan < 50% kebijakan telah terlaksana										
13.2.2.5	Kehutanan	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang kehutanan. *Atau penilaian berdasarkan ada/tidak dokumen Rencana Aksi Iklim	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2. UPT Terkait 3. KLHK	DLH							
	1. tidak terdapat kebijakan										
	2. terdapat kebijakan namun belum dilaksanakan										
	3. terdapat kebijakan <										

	50% kebijakan telah terlaksana										
	4. terdapat kebijakan dan < 50% kebijakan telah terlaksana										
17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN											
17.2.1.5	Energi bersih terbarukan (misal: solar panel di kantor pemerintah; ganti mobil/motor listrik/bis BBG; untuk PJU (penerangan jalanan umum), untuk WTE (waste to energi))	Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur energi bersih terbarukan yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.	Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)	BPKAD dan DLH	91.489.055	82.200.275	836.367.454	819.098.530	814.958.910	794.308.407	
17.2.1.6	Sarana Pengolahan Limbah	Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur limbah yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.	Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)	BPKAD dan DLH	-	-	-	-			
17.2.1.8	Hutan Kota	Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur hutan kota yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.	Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)	BPKAD dan DLH	83975.6900	812884400	1.170.509.320	1.165.517.544	1.356.584.447	1.348.150.007	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan ini diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tidak mendapatkan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

BAB IV

INOVASI, PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Inovasi Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Daftar Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2025

No	Inovasi	Tahun	Nama OPD	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
1	Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM)	2025	DLH	Pelayanan Publik	OPBM adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Kelurahan untuk melakukan pengumpulan sampah dari rumah ke rumah (<i>door to door</i>).
2	Kegiatan Layanan edu forest ceria (Hutan Kota)	2025	DLH	Pelayanan Publik	Kegiatan ini Memberikan pengetahuan/ pengenalan terhadap pohon/tanaman dan satwa/hewan secara outdoors sehingga menumbuhkan kecintaan terhadap pohon/satwa serta memberikan pelatihan cara menanam pohon sehingga pelestarian lingkungan akan tetap terjaga.

Adapun prestasi dan penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi selama tahun 2025, sebagai berikut :

1. Sertifikat Penghargaan atas Kinerja Peningkatan Upaya Pelayanan Penanganan dan Pengurangan Sampah Tahun 2025 oleh Bapak Wali Kota Jambi.
2. Sertifikat Penghargaan Sebagai Terbaik Ketiga atas Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terbaik oleh Bapak Wali Kota Jambi.
3. Penetapan 12 Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025 untuk SDN/SD Swasta Kota Jambi dan SMPN/SMP Swasta Kota Jambi.

BAB V

PENUTUP

Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 96,36%. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian indikator tersebut, secara umum persentase capaian 96,36% dalam kategori sangat baik.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.60.756.831.555,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 56.073.736.742,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp. 4.683.094.813,-.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 56.073.736.742,- (lima puluh enam milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi Kota Jambi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang

telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah 92,29% atau dalam skala ordinal **Baik** dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.